

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi akuntansi pemerintahan daerah diawali pada tahun 2007 setelah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Serta diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem akuntansi keuangan daerah menyatakan dalam mengelola keuangan daerah maka setiap pemerintah berkewajiban untuk memanfaatkan teknologi yang ada guna meningkatkan keuangan daerah dan mendistribusikannya untuk pelayanan publik (Kasfari 2019).

Pada umumnya tujuan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada instansi pemerintah lebih menekankan pada tingkat pengurangan kesalahan dalam memproses transaksi yang selama ini dilakukan secara manual dan memberikan informasi laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan, sehingga memberikan dampak yang luar biasa mengingat instansi pemerintah merupakan sektor publik yang paling tingkat tinggi ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan dan pemrosesan. (Nurfasa 2017).

Disamping sistem akuntansi, faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja

menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi (Saifanur 2020).

Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Saifanur 2020).

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, begitu juga

dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Salah satu yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya. Pemerintahan dengan laporan keuangan yang baik akan menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan tentunya tidak terdapat keganjilan dalam penyajiannya.

Pengendalian pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Salah satu bentuk pengendalian pemerintah pusat atas pemerintah daerah adalah dilakukannya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. pengungkapan kinerja diperlukan untuk menunjukkan prestasi pelayanan masyarakat yang telah disediakan oleh pemerintah baik pusat dan daerah (Fatmawati 2018)

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
3. Untuk mengetahui apakah implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Sejatinya penelitian memberikan manfaat yang berguna bagi pembaca dan diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan memahami mengenai pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap peningkatan efisiensi perusahaan serta dapat memberikan inspirasi untuk penelitian selanjutnya.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sebagai alat ukur kemampuan yang didapat dari bangku perkuliahan. penelitian ini juga member

manfaat untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah. hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Bagi penulis ini dapat dijadikan bahan kajian untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah

b. Bagi pembaca

Bagi pembaca penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi tentang pengaruh implementasi sistem, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah.

1.5 Ruang lingkup dan batasan penelitian

Pembahasan mengenai batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah pada pokok permasalahan yang dibahas peneliti, oleh karena itu diharapkan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang ditetapkan. peneliti membatasi penelitian ini pada :

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada kantor badan pendapatan daerah kota palopo
- b. Data penelitian ini berasal dari karyawan pada kantor badan pendapatan daerah kota palopo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian yang menggunakan teori-teori yang relevan. Landasan teori ini membantu dalam penyusunan penelitian ini dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan.

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) bahwa teori agensi menggambarkan hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh *principal* (rakyat) yang menggunakan *agent* (pemerintah) untuk melakukan atau menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, rakyat mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada pemerintah setuju untuk bertindak atas wewenang rakyat. Adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* sebagai pemegang mandat dari *principal* untuk melakukan perilaku yang tidak semestinya (*dysfunctional behavior*). Untuk mengawasi perilaku *agent* serta menyelaraskan tujuan *principal* dan *agent*, *principal* mewajibkan *agent* untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan kepadanya melalui mekanisme pelaporan keuangan sebagai informasi kinerja *agent* (Scott 2003). Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab *agent*, *principal* dapat mengukur,

menilai sekaligus mengawasi kinerja *agent*, sejauh mana *agent* telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan *principal*.

2.1.2 Teori Kontigensi (*contingency theory*)

contingency theory, dipelopori oleh *burn* dan *stalker* (otley 1980), dalam penelitian tahun 1950-an di Inggris tentang *task environment*. dalam penelitiannya mengidentifikasi tipe struktur dan praktik manajemen yang tepat untuk berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. hasilnya menunjukkan bahwa organisasi yang mekanistik (dengan ciri-ciri: pembagian tugas spesifik dan tegas) tepat untuk lingkungan yang stabil, sedangkan organisasi yang dinamis (dengan ciri-ciri struktur yang fleksibel) tepat untuk lingkungan yang tidak stabil. dalam otley (1980), teori kontingensi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi sistem akuntansi tersebut tergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi. kesesuaian (*fit*) yang lebih baik antara sistem pengawasan dengan variabel kontingensi menghasilkan kinerja organisasi yang meningkat. berdasarkan pada *contingency theory*, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah, dan fungsi pengawasan pada bapenda, tergantung pada kondisi bapenda yang bersangkutan.

2.2 Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Dwijowijoto, 2003).

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam wahab (2004), implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

2.3 Sistem Informasi Akuntansi

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan dan keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen (Prima 2020).

Dalam suatu perusahaan, sistem akuntansi memegang peranan penting dalam mengatur arus pengolahan data akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat dan akurat. Suatu sistem akuntansi disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berguna bagi pihak ekstern dan intern (Silvia 2016).

Kualitas sistem informasi akuntansi yang berkualitas dihasilkan oleh sistem informasi yang mengoptimalkan operasi sistem akuntansinya, karena sistem informasi akuntansi yang berkualitas akan dijadikan manager dalam pengambilan

keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas perlu adanya sebuah sistem yang mengolah data menjadi sebuah informasi yang berharga yang mana dituntut adanya informasi yang cepat, tepat dan akurat sehingga mengakibatkan persaingan yang semakin kompetitif (Rizka 2019).

2.3.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2018) mengatakan keenam komponen sistem informasi akuntansi diatas memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tiga fungsi bisnis penting, yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti misalnya melakukan penjualan dan pembelian bahan baku dengan proses yang sering dilakukan secara berulang.
2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan personil organisasi.
3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi.

2.3.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam buku “ sistem informasi akuntansi : Teori dan Pratikal” (2018) yang ditulis oleh Anna Marina, Sentot Imam Wahjono, Ma’ruf Syaban, dan Agusdiwana Suarni. Dijelaskan Tujuan sistem informasi akuntansi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan kegiatan keuangan perusahaan
2. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.
3. Melakukan pengendalian terhadap seluruh aspek perusahaan.

2.3.4 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Terdapat enam komponen sistem informasi akuntansi menurut (Romney & Steinbart (2018), yaitu :

1. Para pengguna yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, perangkat perifer, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi.

2.3.5 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2018) sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat serta menambah nilai untuk organisasi dengan:

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan (jasa).
2. Meningkatkan efisiensi.
3. Berbagi pengetahuan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya (supply chains).
5. Memperbaiki struktur pengendalian internal.
6. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan.

2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah (Annisa 2017)

Dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana

desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. (Novelya 2016).

2.4.2 Prinsip dan indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab VI Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa daerah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kemudian hal ini di *follow up* dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas kepada daerah dalam wujud desentralisasi untuk mengurus daerahnya. Melalui kebijakan otonomi daerah dapat berdampak positif terhadap :

1. Perkembangan pembangunan ekonomi daerah yang efektif, efisien dan tangguh dengan memberdayakan *stakeholder* dan potensi ekonomi daerah;

2. Kemajuan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat; dan
3. Meningkatkan kualitas hidup melalui sumber daya manusia di daerah yang handal yang mampu mengelola potensi dan kepentingan daerah. Hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk merealisasikannya diperlukan dukungan *resources financing* (sumber daya pendanaan) dalam membangun daerah sejalan dengan implementasi desentralisasi. Oleh sebab itu harus disertai juga dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh pemerintah daerah (*good governance*). Di dalam pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada prinsip-prinsip :

1. *Transparance* (Transparansi), yaitu adanya keterbukaan dari pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan mengenai keuangan daerah, dan memberikan kebebasan memperoleh informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan keuangan dalam pembangunan daerah.
2. *Efficient* (Efisien), yaitu setiap pengeluaran anggaran daerah berdasarkan proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan *output* atau *income* tanpa mengurangi pelayanan yang optimal kepada publik.
3. *Effective* (Efektif), yaitu dalam implementasi kebijakan keuangan harus tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta realisasi anggaran sesuai dengan rencana pembangunan dan habis terpakai.
4. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada semua elemen

masyarakat. Secara institusional pertanggungjawaban dilakukan kepada Legislatif (DPRD) sebagai representatif dari masyarakat yang dapat menilai kinerja Eksekutif (PEMDA) dengan menggunakan kriteria dan tolok ukur yang bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran.

5. *Participative* (Partisipatif), yaitu adanya peran serta langsung atau tidak langsung dari publik dalam memberikan kajian, koreksi/kritikan, dan masukan yang konstruktif terhadap system pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel. Di samping itu, kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memberi peran yang besar kepada masyarakat dalam wujud pemberdayaan masyarakat dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan.

2.4.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab

Pertanggung jawaban (accountability) pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), kepala daerah (orang yang membawahi semua satuan tata usaha) dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup :

- Keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu.
- Pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah pengghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus di tata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).

3. Kejujuran

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

4. Hasil guna dan daya guna

Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai; mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang

diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

2.5 Kinerja Pemerintah Daerah

2.5.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Zein (2016) menyebutkan Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sedangkan definisi pemerintah daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2 yaitu Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Endang dan Rosmida (2016) kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Menurut Rahmawati dan Fajar (2017) Pengendalian pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Salah satu bentuk pengendalian pemerintah pusat atas pemerintah daerah adalah dilakukannya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran

kinerja. Sistem pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengungkapan kinerja diperlukan untuk menunjukkan prestasi pelayanan masyarakat yang telah disediakan oleh pemerintah baik pusat dan daerah.

Kinerja pemerintahan daerah dengan sendirinya merupakan seluruh capaian/hasil-hasil selama pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang diharapkan tentunya perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi pemerintah daerah. Berdasarkan rencana strategi tersebut maka dapat diukur sejauh mana pemerintah daerah telah mampu mencapai sasaran/target (kinerja) yang telah diterapkan baik dengan indikator kuantitatif maupun kualitatif. kinerja dapat digambarkan sebagai fungsi proses dari respon individu terhadap ukuran kinerja yang diharapkan organisasi, yang mencakup desain kerja, proses pemberdayaan, dan pembangunan dari sisi individu itu sendiri yang mencakup keterampilan, kemampuan dan pengetahuan. kinerja merupakan hasil dari suatu proses perpaduan kapabilitas individu dengan sikap individu terhadap aspek pekerjaan dan organisasi (Chici 2017).

2.5.2 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mohammad (2006), indikator kinerja pemerintah daerah ada beberapa jenis yaitu:

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Indikator proses (*process*) dalam indikator ini organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaankegiatan tersebut.
3. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik.
4. Indikator hasil (*outcomes*) segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Dan Penulis	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh implementasi system akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten aceh utara (Neo Agustina dan Ahmad Saifanur 2020)	Implementasi system akuntansi (X1) Pengelolaan keuangan daerah (X2), Pengawasan internal(X3), Dan Kinerja keuangan pemerintah (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada SKPD kabupaten aceh utara.
2.	Pengaruh implementasi system akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan	Implementasi sistem akuntansi(X1), pengelolaan keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi, pengelolaan

	internal terhadap kinerja pemerintah kota kotamobagu (DN Lintong, DPE Saerang, 2017)	daerah(X2), pengawasan internal (X3), dan kinerja pemerintah kota (Y)	keuangan daerah berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintahan kota kotamobagu sedangkan pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah kota kotamobagu.
3.	Pengaruh implementasi system akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah (Survei pada pemda di jawa tengah) (Rohman, 2009).	Implementasi sistem akuntansi(X1), pengelolaan keuangan daerah (X2), fungsi pengawasan (X3), dan kinerja pemerintah daerah(Y).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern sedangkan fungsi pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
4.	Pengaruh pengelolaan	Pengelolaan	Hasil penelitian ini

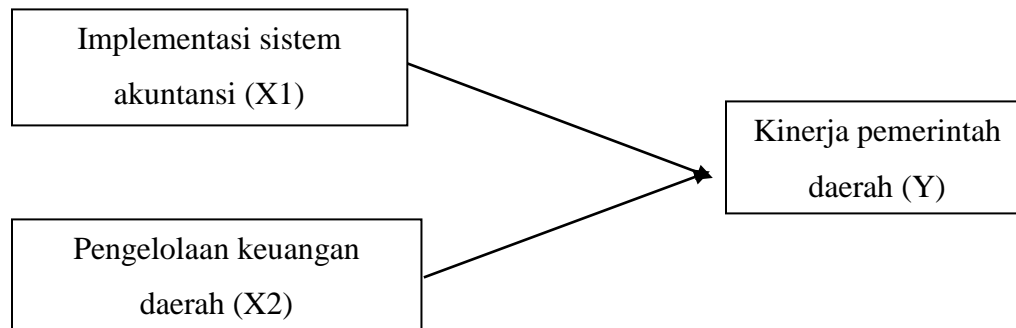
	keuangan daerah dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah dikabupaten padang pariaman) (Rahmad Hidayat,2015)	keuangan daerah (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), kinerja pemerintah daerah (Y)	menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah dikabupaten padang pariaman.
5.	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah (Studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kota semarang) (Dea rahma novitasari,Wahyu prabowo 2020)	Pengelolaan keuangan daerah (X1), pengawasan internal (X2), kinerja pemerintah (Y)	Pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah kota semarang.
6.	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Pengelolaan keuangan daerah (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), kualitas laporan keuangan pemerintah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

	daerah. (Siska yulia, 2018)	daerah (Y)	daerah, sedangkan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7.	Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten buleleng. (Made budi sastra wiguna, 2015)	Pengawasan keuangan daerah (X1), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah(X2), kinerja pemerintah daerah (Y),	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten buleleng.
8.	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah (Annisa ramadhani,2019)	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah(X1), akuntabilitas(X2), transparansi(X3) dan kinerja pemerintah daerah (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan transparansi tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja

			pemerintah daerah.
--	--	--	--------------------

2.7 Kerangka Konseptual

Menurut kusumayati (2009) bahwa kerangka konsep merupakan hubungan antara konsep yang dibangun sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, kerangka penelitian ini yaitu sebagaimana dalam gambar 2.2 berikut ini



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

1. Implementasi Sistem Akuntansi merupakan penerapan dari pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu aktivitas yang mencakup tahap perencanaan, tahap penyusunan dan penetapan APBD, tahap pelaksanaan APBD termasuk didalamnya bagaimana penatausahaannya, tahap pertanggungjawaban, dan pengawasan.
3. Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

Pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu.

2.8 Hipotesis penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan Sugiyono (2018). Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah di uraikan sebelumnya maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

2.8.1 Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Bahwa teori agensi menggambarkan hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh *principal* (rakyat) yang menggunakan *agent* (pemerintah) untuk melakukan/menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, rakyat mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada pemerintah setuju untuk bertindak atas wewenang rakyat.

Penelitian yang dilakukan Hendriksen 2005 implementasi sistem akuntansi pemerintahan, diharapkan mampu menjamin bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan dimana bisa diperiksa

segala transaksi yang terjadi didalam entitas itu, yakni entitas pemerintah adapun sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan hipotesis pertama yang diajukan ialah:

H1: Implementasi sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

2.8.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan. *Agency Theory* yang memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (*self-interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship theory* (Solihin, 2008). Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Berdasar *Agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang

diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya information asymmetry yang terjadi dapat berkurang.

Penelitian yang dilakukan Jabra 1989 pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran periodic yang diukur dengan seperangkat indikator kerja. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jumlah dana yang dialokasikan . keterkaitan tersebut dapat memudahkan perencanaan yang bersifat menyeluruh baik dari segi pencapaian sasaran, perumusan dan implementasi program, kegiatan, maupun proses penetapan dan pengendalian anggaran serta analisis kinerja. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan hipotesis pertama yang diajukan ialah :

H2: Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang sistematis dengan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, baik pada bagian-bagian maupun pada hubungannya.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini pada kantor bapenda (badan pendapatan daerah) kota palopo, tepatnya JL. Andi mas jaya, boting, wara, kota palopo. adapun waktu penelitiannya yakni bulan September 2021.

3.3 Populasi dan sampel penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut sugiyono (2019) definisi populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur atau yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai pada kantor Bapenda Kota Palopo sebanyak 50 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019) dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Hidayat, 2015: 87). Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan sampling jenuh yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang ada yaitu 50 orang.

3.4 Jenis dan sumber data

3.4.1 Jenis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu implementasi sistem akuntansi sebagai (X1), pengelolaan keuangan daerah sebagai (X2, terhadap variabel dependen yakni kinerja pemerintah daerah sebagai (Y)

3.4.2 Sumber data

Sumber Data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

3.4.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) yang berisi pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan kuesioner langsung, dimana kuesioner ini diantar langsung kepada responden.

3.4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian mengenai “pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota palopo). Ada 3 variabel pada penelitian ini yaitu implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah

3.4.5 Definisi Operasional

Tabel 2.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Deskripsi	Indikator
1.	Implementasi Sistem Informasi Akuntansi	Merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemudahan dan kemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.	1. Kemudahan 2. Kemanfaatan
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Merupakan suatu aktivitas yang mencakup tahap perencanaan, tahap penyusunan, dan penetapan APBD, tahap pelaksanaan APBD termasuk didalamnya bagaimana penatausahanya, tahap pertanggungjawaban, dan pengawasan	1. <i>planning</i> 2. <i>budget setting</i> 3. <i>activity of budget implementation</i>
3.	Kinerja Pemerintah	Merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan	1. Ekonomi (<i>economy</i>)

	Daerah	suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (<i>strategic planning</i>) suatu organisasi.	2. Efisiensi (<i>efficiency</i>) 3. Efektivitas (<i>effectiveness</i>)
--	--------	---	---

3.5 Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif analisis data merupakan kegiatan setelah data penelitian semua terkumpul. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang memiliki 5 poin rating yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Alternatif Jawaban dengan Skala Likert

Simbol	Alternatif Jawaban	Nilai
SS	Sangat setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak setuju	2
STS	Sangat tidak setuju	1

3.6 Analisis data

Langkah selanjutnya setelah kuesioner kembali dan sudah diisi oleh responden adalah metode analisis yang sesuai untuk digunakan. Selanjutnya yaitu memberikan dan menjumlahkan bobot jawaban dari pertanyaan setiap variabel. Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

3.6.1 Uji statistic deskriptif

Menurut Grahita Chandrarin (2017) tujuan dari uji statistik deskriptif adalah untuk menguji dan mendeskripsikan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasil uji statistic deskriptif biasanya berupa yang berisi variabel yang diobservasi, mean, deviasi standar, maksimum dan minimum, dan kemudian diikuti penjelasan berupa narasi tentang interpretasi isi table tersebut.

3.6.2 Uji kualitas data

Pengujian kualitas data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti akan digunakan sebagai alat pembuktian hipotesis. Untuk menguji keabsahan jawaban dari responden agar instrumen layak dipakai maka peneliti akan melakukan pengujian berikut ini:

3.6.2.1 Uji validasi

Menurut Ghazali (2016), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut. Kuesioner penelitian dikatakan valid jika nilai signifikansi $< 0,05$. Kriteria pengujian apabila nilai pearson correlation $< r$ tabel maka item pernyataan dikatakan

tidak valid, sedangkan apabila nilai pearson correlation $> r$ tabel maka item pernyataan dikatakan valid.

3.6.2.2 Uji reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016). Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam menguji reliabilitas data pada penelitian akan menggunakan formula Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2016).

3.6.2.3 Uji signifikan variabel (uji statistik 1)

Menurut Grahita Chandrarin (2017) Uji t merupakan pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen signifikan terhadap variabel dependen yang dipormulasikan dalam model. Uji ini merupakan uji lanjutan ketika ada kepastian dari uji F yang hasilnya signifikan.

Kriteria signifikansi variabel untuk teknik analisis regresi linear berganda sama dengan kriteria signifikansi pada teknik analisis regresi linear sederhana. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan nilai signifikansi p. jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$ maka pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen secara statistic signifikan pada level alfa sebesar 5%. Sebaliknya

jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,005$, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara statistik tidak signifikan.

3.6.2.4 Uji koefisien determinasi (R²)

Menurut Grahita Chandrarin (2017) Uji koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel yang dimasukkan dalam model regresi, dimana setiap penambahan satu variabel bebas dan pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R² meskipun variabel yang dimasukkan itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan, Adjusted R Square (R²adj). Koefisien determinasi yang telah disesuaikan berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan unsur jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan, maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun akibat adanya penambahan variabel baru dalam model.

3.6.2.5 Uji signifikan simultan (uji statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi linear sederhana sudah tepat. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai F dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai $P \leq 0,05$ maka model persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebesar 5%, sehingga

dapat disimpulkan bahwa model yang diformalitaskan dalam persamaan regresi linear berganda sudah tepat. Begitupun sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,05$ maka model persamaan regresinya tidak signifikan pada level alfa sebesar 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda belum tepat. Uji model ini merupakan uji yang harus dipenuhi terlebih dahulu signifikannya sebelum melanjutkan ke uji signifikansi (uji t). Uji F ini bersifat necessary condition yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji signifikansi variabel (Chandrarin 2017).

3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam model regresi berganda, yaitu model yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi berganda variabel tergantung (terikat) dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel terikat.

Dalam model diatas terlihat bahwa variabel terikat dipengaruhi dua atau lebih variabel bebas, berdasarkan pemaparan diatas maka model persamaan analisis regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

Y = Kinerja pemerintah daerah

a = Konstan (*Intercept*)

b1 = Koefisien Regresi untuk X1

b_2 = Koefisien Regresi untuk X_2

X_1 = Variabel bebas implementasi sistem Akuntansi

X_2 = Variabel Bebas Pengelolaan Keuangan Daerah

e = nilai *error*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BAPENDA /Badan pendapatan Daerah adalah organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan dan lain sebagainya. Fungsi BAPENDA salah satunya adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah. Tugas pokok BAPENDA adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta mengadakan pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Kantor BAPENDA daerah Kota Palopo, provinsi Sulawesi Selatan. BAPENDA Kota Palopo yang berada di JL. Andi mas jaya, boting, wara, kota palopo, bertanggung jawab untuk urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. komitmen Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo, untuk memberikan fasilitas terbaik kepada masyarakat melalui pelayanan pajak daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Selain itu, BAPENDA Pendapatan Daerah atau juga dikenal dengan singkatan BAPENDA memiliki tugas dan fungsi lainnya. BAPENDA memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah. Untuk fungsi BAPENDA adalah merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya. Beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab BAPENDA ialah pengawasan penerimaan pajak baik pajak rumah bagunanan, tanah, kendaraan motor dan mobil, PBB perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak parkir mobil dan motor di wilayahnya. Terkait dengan hal itu, BAPENDA memiliki wewenang untuk menerbitkan izin-izin tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan parkir, izin reklame, dan lainnya. Untuk informasi lain terkait BAPENDA, Anda dapat langsung berkunjung ke kantor BAPENDA terdekat, menghubungi kontak nomor telepon, atau mengakses website resmi BAPENDA untuk informasi umum.

4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yaitu menampilkan identitas responden seperti jenis kelamin, umur, gelar/strata, latar belakang pendidikan serta lama bekerja di Bapenda Kota palopo. Identitas pada penelitian ini dapat dikatakan kurang lengkap yaitu hampir sebagian dari responden tidak menyebutkan namanya dalam kuesioner penelitian ini sehingga sebagian dari kuesioner pada kolom nama banyak yang dikosongkan atau tidak di cantumkan namanya. Pada penelitian yang dilakukan

selama kurang lebih satu bulan, peneliti memperoleh data dari responden yang telah diberikan lembar kuesioner oleh peneliti, adapun data tersebut berikut ini:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia yaitu menguraikan atau menggambarkan usia responden. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu: usia 21-30 tahun, 31-40 tahun dan usia > 40 tahun. Adapun karakteristik responden menurut usia dapat disajikan melalui tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Karakteristik responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	21-30 tahun	18	36,2
2	31-40 tahun	19	38,3
3	> 40 tahun	13	25,5
Jumlah		50	100

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan data pada tabel 4.1 tentang karakteristik responden berdasarkan usia, dapat kita ketahui bahwa jumlah responden yang berusia 21-30 tahun yaitu sebanyak 18 orang atau sekitar 36,2% dari seluruh jumlah responden, responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 19 orang atau sekitar 38,3% dari seluruh jumlah responden dan responden yang berusia > 40 tahun yaitu berjumlah 13 orang atau sekitar 25,5% dari seluruh jumlah responden.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu menguraikan atau menggambarkan jenis kelamin responden. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu: laki-laki dan perempuan.

Adapun karakteristik responden menurut jenis kelamin dapat disajikan melalui tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	16	29,8
2	Perempuan	34	70,2
Jumlah		50	100

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan data pada tabel 4.2 tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat kita ketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 16 orang atau sekitar 29,8% dari seluruh jumlah responden. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 34 orang atau sekitar 70,2% dari seluruh jumlah responden.

4.2 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bapenda Kota Palopo. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh pegawai di kantor Bapenda kota palopo sebanyak 60 kuesioner dan jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 50 atau tingkat pengambilan data kuesioner sebanyak 90%. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Pengumpulan Data Primer Penelitian

NO	Keterangan	Jumlah Kusioner	Persentase (%)
1	Distribusi Kuesioner	60	100%
2	Kuesioner Kembali	50	90%
3	Kuesioner Cacat/tidak kembali	10	10%
4	Kuesioner yang dapat diolah	50	90%

n = Sampel yang kembali
Responden rate = $50 \times 100\%$
60
= 90%

Sumber data : data primer diolah (2021)

4.2.1.Deskripsi Implementasi Sistem akuntansi

Beberapa masalah yang muncul pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yaitu: pengguna sistem informasi akuntansi mengungkapkan bahwa yang menjadi penghambat atau masalah yang terjadi dimana masih ada masalah user lag, yang dapat dikatakan sebagai masalah kecanggungan pengguna, kurangnya pengetahuan pengguna pada penerapan sistem baru dan juga penyesuaian yang dibutuhkan oleh pengguna, jaringan Internet kurang bagus, terdapat pengguna yang kurang mengerti tentang penggunaan teknologi sehingga pekerjaannya dilakukan kurang maksimal, banyaknya komputer yang kurang mendukung sehingga dapat menghambat dalam membuat suatu pekerjaan, sehingga pada penerapan sistem tersebut keahlian para pengguna masih harus dilatih pada aktivitas sehari-hari.

Padahal peranan sistem informasi akuntansi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan lagi. Semakin cepat pengelolaan data yang akan disajikan perusahaan akan semakin cepat memberikan informasi tentang perusahaan. Maka dengan dukungan sistem informasi akuntansi di suatu perusahaan akan menambah berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.

4.2.2 Deskripsi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menilai kondisi keuangan, mengevaluasi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pendapatan Daerah sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2018 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan Badan Pendapatan Daerah yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah antara lain:

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4.2.3 Deskripsi Kinerja Pemerintah Daerah

Setiap penyelenggara pemerintahan harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban (accountability) setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam

pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya “Good Governance” dalam perspektif yang lebih luas. LKIP Provinsi Banten disusun berdasarkan laporan dari LKIP setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini yang mendasari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten untuk menyusun LKIP untuk tahun anggaran 2019.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Grahita Chandrarin (2017) tujuan dari uji statistik deskriptif adalah untuk menguji dan mendeskripsikan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasil uji statistic deskriptif biasanya berupa yang berisi variabel yang diobservasi, mean, deviasi standar, maksimum dan minimum, dan kemudian diikuti penjelasan berupa narasi tentang interpretasi isi tabel tersebut. Berdasarkan lampiran tabel deskriptif yang diolah dengan bantuan program aplikasi SPSS versi 26 sebagai berikut:

a. Variabel Implementasi Sistem Akuntansi

Untuk variabel kecerdasan intelektual terdiri dari 10 item pertanyaan. Hasil dari pertanyaan responden sebagai berikut:

Tabel 4.4 Deskripsi Item Pertanyaan Implementasi Sistem Akuntansi

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
XI.1	4	23	10	41	11	3,36
	4,3%	24,7%	10,8%	44,1%	11,8%	
XI.2	3	17	17	35	17	3,52
	3,2%	18,3%	18,3%	37,6%	18,3%	
XI.3	2	15	29	35	8	3,36
	2,2%	16,1%	31,2%	37,6%	8,6%	
XI.4	3	19	23	37	7	3,29
	3,2%	20,4%	24,7%	39,8%	7,5%	
XI.5	5	14	27	34	9	3,31
	5,4	15,1	29,0	36,6	9,7	
XI.6	2	16	22	43	6	3,39
	2,2%	17,2%	23,7	46,2	6,5%	
XI.7	2	22	16	40	9	3,36
	2,2%	23,7%	17,2%	43,0%	9,7	
XI.8	3	17	19	40	10	3,42
	3,2%	18,3%	20,4%	43,0%	10,8%	
XI.9	1	13	18	42	15	3,64
	1,1%	14,0%	19,4%	45,2%	16,1%	
XI.10	3	15	27	30	14	3,42
	3,2%	16,1%	29,0%	32,3%	15,1%	

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 yang menunjukkan hasil dari 89 responden yang diteliti.

Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 4 orang atau 4,3%, jawaban tidak setuju 23 orang atau 24,7%, jawaban netral 10 orang atau 10,8%, jawaban setuju 41 orang atau 44,1% dan jawaban sangat setuju 11 orang atau 11,8%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan pertama Implementasi Sistem Akuntansi.

Pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3 orang atau 3,2%, jawaban tidak setuju 17 orang atau 18,3%, jawaban netral 17 orang atau

18,3%, jawaban setuju 35 orang atau 37,6% dan jawaban sangat setuju 17 orang atau 18,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kedua Implementasi Sistem Akuntansi.

Pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 15 orang atau 16,1%, jawaban netral 29 orang atau 31,2%, jawaban setuju 35 orang atau 37,6% dan jawaban sangat setuju 8 orang atau 8,6%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan ketiga Implementasi Sistem Akuntansi.

Pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3 orang atau 3,2%, jawaban tidak setuju 19 orang atau 20,4%, jawaban netral 23 orang atau 24,7%, jawaban setuju 37 orang atau 39,8% dan jawaban sangat setuju 7 orang atau 7,5%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keempat Implementasi Sistem Akuntansi.

Pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 5 orang atau 5,4%, jawaban tidak setuju 14 orang atau 15,1%, jawaban netral 27 orang atau 29,0%, jawaban setuju 34 orang atau 36,6% dan jawaban sangat setuju 9 orang atau 9,7%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kelima Implementasi Sistem Akuntansi.

Pernyataan keenam, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 16 orang atau 17,2%, jawaban netral 22 orang atau 23,7%, jawaban setuju 43 orang atau 46,2% dan jawaban sangat setuju 6 orang

atau 6,5%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keenam Implementasi Sistem Akuntansi.

Pernyataan ketujuh, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 22 orang atau 23,7%, jawaban netral 16 orang atau 17,2%, jawaban setuju 40 orang atau 43,0% dan jawaban sangat setuju 10 orang atau 10,8%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan ketujuh Implementasi Sistem Akuntansi.

Pernyataan kedelapan, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3 orang atau 3,2%, jawaban tidak setuju 17 orang atau 18,3%, jawaban netral 19 orang atau 20,4%, jawaban setuju 40 orang atau 43,0% dan jawaban sangat setuju 10 orang atau 10,8%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kedelapan Implementasi Sistem Akuntansi.

Pernyataan kesembilan, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 1 orang atau 1,1%, jawaban tidak setuju 13 orang atau 14,0%, jawaban netral 18 orang atau 19,4%, jawaban setuju 42 orang atau 45,2% dan jawaban sangat setuju 15 orang atau 16,1%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kesembilan Implementasi Sistem Akuntansi.

Pernyataan kesepuluh, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3 orang atau 3,2%, jawaban tidak setuju 15 orang atau 16,1%, jawaban netral 27 orang atau 29,0%, jawaban setuju 30 orang atau 32,3% dan jawaban sangat setuju 14 orang atau 15,1%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kesepuluh Implementasi Sistem Akuntansi.

b. Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk variabel pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 8 item pertanyaan.

Hasil dari pertanyaan responden sebagai berikut:

Tabel 4.5 Deskripsi Item Pertanyaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
PKD.1	4	20	15	33	17	3,44
	4,3%	21,5%	16,1%	35,5%	18,3%	
PKD.2	6	14	24	27	18	3,42
	6,5%	15,1%	25,8%	29,0%	19,4%	
PKD.3	3	19	28	27	12	3,29
	3,2%	20,4%	30,1%	29,0%	19,4%	
PKD.4	2	17	17	35	18	3,56
	2,2%	18,3%	18,3%	37,6%	19,4%	
PKD.5	4	15	30	22	18	3,39
	4,3%	16,1%	32,3%	23,7%	19,4%	
PKD.6		19	22	28	20	3,55
		20,4%	23,7%	30,1%	21,5%	
PKD.7	4	14	23	27	21	3,53
	4,3%	15,1%	24,7%	29,0%	22,6%	
PKD.8	3	13	20	31	22	3,63
	3,2%	14,0%	21,5%	33,3%	23,7%	

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.3 yang menunjukkan hasil dari 89 responden yang diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 4 orang atau 4,3%, jawaban tidak setuju 20 orang atau 21,5%, jawaban netral 15 orang atau 16,1%, jawaban setuju 33 orang atau 35,5% dan jawaban sangat setuju 17 orang atau 18,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan pertama Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 6 orang atau 6,5%, jawaban tidak setuju 14 orang atau 15,1%, jawaban netral 24 orang atau 25,8%, jawaban setuju 27 orang atau 29,0% dan jawaban sangat setuju 18 orang atau 19,4%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kedua Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3 orang atau 3,2%, jawaban tidak setuju 19 orang atau 20,4%, jawaban netral 28 orang atau 30,1%, jawaban setuju 27 orang atau 29,0% dan jawaban sangat setuju 12 orang atau 12,6%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “netral” atas pertanyaan ketiga Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 17 orang atau 18,3%, jawaban netral 17 orang atau 18,3%, jawaban setuju 35 orang atau 37,6% dan jawaban sangat setuju 18 orang atau 19,4%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keempat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 4 orang atau 4,3%, jawaban tidak setuju 15 orang atau 16,1%, jawaban netral 30 orang atau 32,3%, jawaban setuju 22 orang atau 23,7% dan jawaban sangat setuju 18 orang atau 19,4%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “netral” atas pertanyaan kelima Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pernyataan keenam, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 0, jawaban tidak setuju 19 orang atau 20,4%, jawaban netral 22 orang atau 23,7%,

jawaban setuju 28 orang atau 30,1% dan jawaban sangat setuju 20 orang atau 21,5%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keenam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pernyataan ketujuh, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 4 orang atau 4,3%, jawaban tidak setuju 14 orang atau 15,1%, jawaban netral 23 orang atau 24,7%, jawaban setuju 27 orang atau 29,0% dan jawaban sangat setuju 21 orang atau 22,6%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan ketujuh Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pernyataan kedelapan, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3 orang atau 3,2%, jawaban tidak setuju 13 orang atau 14,0%, jawaban netral 20 orang atau 21,5%, jawaban setuju 31 orang atau 33,3% dan jawaban sangat setuju 22 orang atau 23,7%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kedelapan Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah terdiri dari 7 item pertanyaan. Hasil dari pertanyaan responden sebagai berikut:

Tabel 4.6 Deskripsi Item Pertanyaan Kinerja Pemerintah Daerah

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
KPD.1	2	14	24	40	9	3,45
	2,2%	15,1%	25,8%	43,0%	9,7%	
KPD.2	4	19	16	38	12	3,39
	4,3%	20,4%	17,2%	40,9%	12,9%	
KPD.3	5	19	20	26	19	3,39
	6,4%	20,4%	21,5%	28,0%	20,4%	

KPD.4	3	16	26	30	14	3,40
	3,2%	17,2%	28,0%	32,3%	15,1%	
KPD.5	2	16	26	29	16	3,45
	2,2%	17,2%	28,0%	31,2%	17,2%	
KPD.6	3	19	24	31	12	3,34
	3,2%	20,4%	25,8%	33,3%	12,9%	
KPD.7	4	12	23	33	17	3,53
	4,3%	12,9%	24,7%	35,5%	18,3%	

Sumber data : Lampiran 3, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 yang menunjukkan hasil dari 89 responden yang diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 14 orang atau 15,1%, jawaban netral 24 orang atau 25,8%, jawaban setuju 40 orang atau 43,0% dan jawaban sangat setuju 9 orang atau 9,7%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan pertama Kinerja Pemerintah Daerah.

Pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 4 orang atau 4,3%, jawaban tidak setuju 19 orang atau 20,4%, jawaban netral 16 orang atau 17,2%, jawaban setuju 38 orang atau 40,9% dan jawaban sangat setuju 12 orang atau 12,9%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kedua Kinerja Pemerintah Daerah.

Pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 5 orang atau 6,4%, jawaban tidak setuju 19 orang atau 20,4%, jawaban netral 20 orang atau 21,5%, jawaban setuju 26 orang atau 28,0% dan jawaban sangat setuju 19 orang atau 20,4%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan ketiga Kinerja Pemerintah Daerah.

Pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3 orang atau 3,2%, jawaban tidak setuju 16 orang atau 17,2%, jawaban netral 26 orang atau 28,0%, jawaban setuju 30 orang atau 32,3% dan jawaban sangat setuju 14 orang atau 15,1%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keempat Kinerja Pemerintah Daerah.

Pernyataan lima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 16 orang atau 17,2%, jawaban netral 26 orang atau 28,0%, jawaban setuju 29 orang atau 31,2% dan jawaban sangat setuju 12 orang atau 12,9%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan kelima Kinerja Pemerintah Daerah.

Pernyataan keenam, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3 orang atau 3,2%, jawaban tidak setuju 19 orang atau 20,4%, jawaban netral 24 orang atau 25,8%, jawaban setuju 31 orang atau 33,3% dan jawaban sangat setuju 12 orang atau 12,9%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan keenam Kinerja Pemerintah Daerah.

Pernyataan ketujuh, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 4 orang atau 4,3%, jawaban tidak setuju 12 orang atau 12,9%, jawaban netral 23 orang atau 24,7%, jawaban setuju 33 orang atau 35,5% dan jawaban sangat setuju 17 orang atau 18,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas pertanyaan ketujuh Kinerja Pemerintah Daerah.

4.3.2 Uji Kualitas Data

4.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut. Kuesioner penelitian dikatakan valid jika nilai signifikansi $< 0,05$. Kriteria pengujian apabila nilai pearson correlation $< r$ tabel maka item pernyataan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai pearson correlation $> r$ tabel maka item pernyataan dikatakan valid.

Hasil r hitung dari 10 pertanyaan (X1), 8 pertanyaan (X2) dan 7 Pertanyaan (Y) sehingga dalam kuesioner penelitian pada variable independen yaitu Implementasi Sistem Akuntansi (X1), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) dan variable dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah. Variable tersebut dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung $> r$ table. Hal tersebut dapat dilihat pada penyajian validitas setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Implementasi Sistem Akuntansi	X1. 1	0,469	0,2732	Valid
	X1. 2	0,506	0,2732	Valid
	X1. 3	0,539	0,2732	Valid
	X1. 4	0,507	0,2732	Valid
	X1. 5	0,612	0,2732	Valid
	X1. 6	0,521	0,2732	Valid
	X1. 7	0,621	0,2732	Valid
	X1. 8	0,539	0,2732	Valid
	X1. 9	0,481	0,2732	Valid
	X1. 10	0,595	0,2732	Valid
Pengelolaan Keuangan	X2.1	0,472	0,2732	Valid

Daerah	X2.2	0,477	0,2732	Valid
	X2.3	0,542	0,2732	Valid
	X2.4	0,540	0,2732	Valid
	X2.5	0,698	0,2732	Valid
	X2.6	0,611	0,2732	Valid
	X2.7	0,698	0,2732	Valid
	X2.8	0,567	0,2732	Valid
	Kinerja Pemerintah Daerah	Y.1	0,661	0,2732
Y.2		0,661	0,2732	Valid
Y.3		0,637	0,2732	Valid
Y.4		0,584	0,2732	Valid
Y.5		0,494	0,2732	Valid
Y.6		0,586	0,2732	Valid
Y.7		0,637	0,2732	Valid

Sumber data : Lampiran 4, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan tentang Implementasi Sistem Akuntansi (X1), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dapat dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{table}$.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam menguji reliabilitas data pada penelitian akan menggunakan formula *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Implementasi Sistem Akuntansi (X1)	0,728	0,60	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	0,709	0,60	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,716	0,60	Reliabel

Sumber data : Lmapiran 5, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* dari semua variable $> 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner penelitian dapat dipercaya sebagai alat ukur dalam menjelaskan Implementasi Sistem Akuntansi (X1), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) dan Kinerja Pemerintah Daerah(Y).

4.3.3 Uji Hipotesis

4.3.3.1 Uji Signifikansi Variabel (Uji Statistik t)

Uji t merupakan pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen signifikan terhadap variabel dependen yang dipormulasikan dalam model. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.287	1.724		.166	.869
	Implementasi Sistem Akuntansi (X1)	-.064	.095	-.080	-.677	.502
	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	.954	.111	1.017	8.560	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

- Hipotesis yang pertama diketahui untuk Implementasi Sistem Akuntansi (X1) $t_{hitung} = -0,677 < t_{tabel} = 1,67793$ ditolak karena lebih kecil $0,502 > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh implementasi system akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga H1 ditolak.
- Hipotesis yang kedua untuk variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) $t_{hitung} = 8,560 > t_{tabel} = 1,67793$ dan signifikan $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam Kinerja Pemerintah Daerah. Sehingga H2 diterima.

4.3.3.2 Uji Koefisien determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.944 ^a	0.891	.886	.759

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Implementasi Sistem Akuntansi (X1)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Berdasarkan table diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,891 artinya bahwa implementasi system akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh sebesar 89,1% dalam kinerja pemerintah daerah sedangkan sisanya 10,9% dipengaruhi oleh variable lain.

4.3.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 0,05.

Tabel 4.11 Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	221.326	2	110.664	191.971	.000 ^b
	Residual	27.194	47	.577		
	Total	248.520	49			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Implementasi Sistem Akuntansi (X1)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 191,971 > F_{tabel} 3,95$. Dengan demikian bahwa semua variable independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen.

4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam model regresi berganda, yaitu model yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi berganda variabel tergantung (terikat) dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel terikat.

Tabel 4.12 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.287	1.724		.166	.869
	Implementasi Sistem Akuntansi (X1)	-.064	.095	-.080	-6.777	.502
	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	.954	.111	1.017	8.560	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Dari tabel diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 0,287 dan nilai koefisien untuk variabel implemntasi sistem akuntansi adalah -0,064 dan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,954 maka persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 0,287 + -0,064 X_1 + 0,954 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh, mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Nilai konstan sebesar 0,287 bernilai positif yang artinya variabel implementasi system akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah bernilai 0 maka variabel kinerja pemerintah daerah mengalami kenaikan sebesar 0,287.
- b. Koefisien regresi variabel Implementasi system akuntansi (X1) mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka variabel Kinerja pemerintah daerah (Y) akan mengalami penurunan 0,064 dengan asumsi bahwa pengelolaan keuangan daerah (X2) konstan.
- c. Koefisien regresi variabel Pengelolaan keuangan daerah (X2) mengalami kenaikan sebesar 0,954 yang artinya jika mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja pemerintah daerah (Y) akan mengalami kenaikan 0,954 dengan asumsi bahwa Implementasi system akuntansi (X1) bernilai konstan.

4.4 Pembahasan

Tabel 4.13 Akumulasi Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Signifikan	Hipotesis
H1	0,001	Diterima
H2	0,000	Diterima

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

4.4.1 Implementasi sistem akuntansi (X1) berpengaruh dalam kinerja pemerintah daerah (Y)

Hipotesis pertama (H1) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh implementasi sistem akuntansi dalam kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil

regresi linear berganda menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan dalam kinerja pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama diterima. Menurut Rahmasari (2012) implementasi system akuntansi merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang akuntan dalam melaksanakan tugas yang dimana tugas tersebut menuntut daya analisis yang tinggi serta proses berpikir yang rasional dalam memecahkan masalah sehingga kinerja yang mereka capai semakin tinggi dan berpengaruh terhadap sikap kejujuran akuntan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi system akuntansi merupakan unsur yang sangat penting dalam kinerja pemerintah daerah. Bisa saja pengelolaan keuangan daerah mendapatkan kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi, namun jika tidak memiliki kemampuan maka sulit baginya untuk melakukan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Dalam penelitian ini implementasi system akuntansi yang dimiliki pegawai di kantor bapenda kota palopo baik sehingga meskipun seorang pegawai memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan system akuntansi yang digunakan dengan tepat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saraswati (2015) yang menunjukkan bahwa pengaruh implementasi system akuntansi berpengaruh dalam kinerja pemerintah daerah.

4.4.2 Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) berpengaruh dalam Kinerja Pemerintah daerah (Y)

Hipotesis kedua (H2) diajukan dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah dalam kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan dalam kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Priadi (2018) dalam penelitiannya yang menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian melisa (2020) dan Andini (2015) yang mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi tidak berpengaruh namun signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi yang tinggi maka kemampuan kinerja pemerintah daerah yang dimiliki semakin baik.

5.2 Saran

1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi sebenarnya, maka dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pernyataan survei secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja menjadi bias dengan kondisi yang ada di lapangan.
2. Pegawai yang bersedia mengisi kuesioner hanya 50 orang. Hal ini dikarenakan sampel dalam penelitian ini yang masih sangat terbatas, proses perizinan yang rumit, kesibukan para responden dan kunjungan para responden dilingkungan luar sehingga proses pengisian kuesioner terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

Andi kasfari dan syukriy Abdullah (2019). implementasi sistem akuntansi instansi berbasis Akrual (saiba) pada balai diklat keagamaan provinsi Aceh. *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi (JIMEKA) vol.4, No.2, (2019) 237-244*

Chici Claraini(2017), Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *JOM Fekon, Vol.4 No.1 (April) 2017*

- Dito Aditia darma nasution dan junawan (2019). Analisis implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Sumatera utara . *Seminar nasional industri dan teknologi (SNIT), politeknik negeri bengkalis*
- Dito aditia darma Nasution (2019). analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal studi akuntansi & keuangan vol.2 No.3 149-162*
- D. R. Novitasari, and T. J. Wahyu Prabowo, "pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang)," *Diponegoro Journal of Accounting, vol. 9, no. 2, May. 2020.*
- Dodik Slamet Pujiono, hari Sukarno, Novi Puspitasari (2016) pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan daerah serta kinerja pemerintah daerah(studi diprovinsi Maluku utara). *Jurnal Bisnis dan ManajemenVol. 10, No 1 Januari 2016*
- Hidayat, Rahmad. (2015). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pada Pariaman). *Jurnal: Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.*
- Hikmatul, M. Saras. (2016). Pengaruh Pengawasan Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal: Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.*
- Hikmatul, M. Saras. (2016). Pengaruh Pengawasan Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal: Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasKomputer Indonesia.*
- Hidayat, Rahmad. (2015). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pada Pariaman). *Jurnal: Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.*
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaan Keuangan Daerah. *Edisi ketiga.Salemba Empat. Jakarta.*
- Halim,A., dan Rohman. 2008. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Maksi Vol7 No.2. Universitas Diponegoro. Semarang.*
- Halim, A., dan Rohman. 2009.Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei PadaPemda

Di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol.9 No.1 ISSN 1412- 0852. Universitas Diponegoro. Semarang*

Herwiyanti, E., Sukirman, & Aziz, F. S. (2017). Analisis implementasi akuntansi berbasis akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 19(1), 13–23*

Indana Sulfah, Sri Wahyuni dan Arina Nurfaza (2019). pengaruh system informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada skpd kabupaten aceh utara. *Jurnal akuntansi dan pembangunan volume 3 nomor 2 november 2017*

Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah(Tesis). *Bengkulu: Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu.*

Linda lambey, Fanny Jitmau, Lintje Kalangi (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Dikabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Volume 12 Nomor 2, 2017*

Mutmainah, Yuliah, (2013). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo. *Jurnal: Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*

Muhammad Azlan, Titiek Herwanti, Endar Pituringsih(2015). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan daerah pada skpd pemerintah kabupaten Lombok timur. *Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 188–198*

Neo Agustina dan Ahmad saifanur (2020). Pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap Kinerja pemerintah kabupaten Aceh utara. *Jurnal akuntansi dan pembangunan volume 5 nomor 3 November 2019*

Novtania Mokoginta, Linda Lambey dan Winston Pontoh (2017). pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern volume 12 nomor 2, 2017, 874-890*

Novian Wira Putra Dan Argo Putra Prima (2020). Evaluasi penerapan sistem pengendalian intern untuk persediaan barang pada PT. Jaya Wasantara kota batam. *volume 3, Nomor 3, September 2020.*

Nasution, D. A. D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual dengan komitmen SKPD sebagai variabel moderating pada provinsi sumatera utara (Tesis). *Medan: Universitas Sumatera Utara.*

- Putra, Nopriansyah.(2016). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom, Vol 19, No 4, Oktober 2016*.
- Pasaribu,F. J. (2011). Pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD(Tesis).*Medan:Program Pasca SarjanaUniversitas Sumatera Utara*.
- Ratna Dian Fatmawati Dan Yayuk Sri Rahayu (2018) Analisis Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada PT BRI Syariah Cabang Malang). *jurnal Manajemen, Akuntansi dan Perbankan november 2018*.
- Rosalia., & Kawedar, W (2017) Implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual pada perguruan tinggi negeri badan hukum: analisis deskriptif kualitatif. *Diponegoro journal of accounting. 6 (3), 1-12*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Siska Yulia Defitri(2017). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Benefita3(1) Februari 2018 (64-75)*
- Syarifudin, Yan S.H. (2010) Pelaksanaan Sistem PengendalianInternal Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif,Efisien Dan Bebas Korupsi. *Jurnal Univertas Tanjung Pura.Vol 3 No.5 (2013).ISSN 0216/2091*.